

KEBIJAKAN TRANSPARANSI ANGGARAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA ANTI KORUPSI

Siti Mahdasyifa
sitimahda51@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu tantangan paling persisten dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama pada sektor-sektor yang memiliki alokasi anggaran besar serta tingkat kompleksitas administratif yang tinggi, seperti sektor kesehatan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga menjadi perhatian di berbagai negara maju, menunjukkan bahwa korupsi merupakan persoalan yang bersifat lintas sistem dan struktural. Dalam konteks global, sektor kesehatan secara luas diakui sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Kerentanan ini muncul karena karakteristik sektor kesehatan yang unik, di antaranya adanya rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah, penyedia layanan, hingga pihak swasta. Selain itu, kebutuhan yang bersifat mendesak dalam pengadaan barang dan jasa kesehatan, terutama dalam situasi darurat seperti krisis kesehatan atau pandemi, sering kali mendorong percepatan proses administratif yang berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, tingginya asimetri informasi antara penyedia layanan kesehatan dan masyarakat sebagai pengguna layanan semakin memperbesar celah terjadinya penyimpangan, karena tidak semua pihak memiliki akses atau pemahaman yang setara terhadap informasi yang tersedia. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan sektor kesehatan sebagai area yang sangat rentan terhadap praktik korupsi, sebagaimana juga ditegaskan oleh Transparency International (2021).

World Health Organization (WHO) mengestimasi bahwa sebagian signifikan dari total pengeluaran kesehatan global belum dimanfaatkan secara efisien. Inefisiensi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, di mana salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya tata kelola serta masih maraknya praktik korupsi dalam sistem kesehatan (WHO, 2020). Ketika pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka potensi penyimpangan menjadi semakin besar, baik dalam

bentuk pemborosan, penggelembungan biaya, maupun penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Dampak dari korupsi di sektor kesehatan pun tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara semata, tetapi memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dan mendalam. Secara langsung, praktik korupsi dapat menurunkan kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan justru disalahgunakan. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan medis menjadi semakin terbatas, terutama bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada layanan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan kesehatan antar kelompok masyarakat, sehingga tujuan utama pembangunan kesehatan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan menjadi sulit tercapai.

Di Indonesia, peningkatan anggaran kesehatan sebagai bagian dari amanat konstitusi menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaannya. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan pelaporan anggaran, yang membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan. Sejumlah kasus korupsi di sektor kesehatan, seperti dalam pengadaan alat kesehatan maupun distribusi bantuan medis, menjadi bukti nyata bahwa celah dalam sistem pengelolaan anggaran masih ada dan belum tertutup secara optimal. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencerminkan adanya pelanggaran individu, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistemik dalam tata kelola keuangan publik di sektor kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah anggaran, jika tidak diiringi dengan penguatan mekanisme transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas, justru berpotensi memperbesar risiko terjadinya korupsi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap kualitas tata kelola, bukan hanya pada besaran anggaran yang dialokasikan.

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam esai ini difokuskan pada pertanyaan utama, yaitu bagaimana kebijakan transparansi anggaran kesehatan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji karena transparansi tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif dalam tata kelola

pemerintahan, tetapi juga memiliki potensi praktis dalam mengurangi berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya di sektor kesehatan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penulisan esai ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan mekanisme transparansi anggaran dalam konteks pemberantasan korupsi. Secara lebih rinci, tujuan yang ingin dicapai meliputi:

1. Menganalisis secara mendalam peran transparansi anggaran dalam mengurangi praktik korupsi di sektor kesehatan, baik dari sisi pencegahan maupun pengendalian.
2. Mengidentifikasi mekanisme kerja transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran kesehatan.
3. Merumuskan strategi kebijakan yang relevan dan implementatif guna mengoptimalkan transparansi sebagai instrumen anti korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, esai ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara konseptual, tetapi juga menawarkan perspektif praktis dalam upaya memperkuat tata kelola sektor kesehatan yang lebih transparan dan akuntabel.

1.3. Tesis

Tesis utama yang diajukan dalam esai ini adalah bahwa transparansi anggaran kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memiliki peran yang jauh lebih strategis dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi. Transparansi tidak sekadar menjadi simbol keterbukaan, melainkan merupakan instrumen kebijakan yang mampu bekerja secara konkret dalam mengatasi berbagai akar permasalahan korupsi yang bersifat sistemik. Melalui penyediaan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, transparansi berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai pengelola anggaran dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, transparansi juga memperkuat akuntabilitas karena setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara lebih jelas. Lebih jauh lagi, transparansi mendorong terbentuknya pengawasan kolektif yang tidak hanya bergantung pada lembaga formal, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi sebagai alat kontrol. Dengan demikian, transparansi anggaran kesehatan dapat dipahami sebagai

mekanisme strategis yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga transformatif dalam menciptakan sistem tata kelola yang lebih bersih, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Transparansi Anggaran dan Korupsi Sektoral

Transparansi anggaran merujuk pada keterbukaan informasi yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan publik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap proses penggunaan anggaran negara harus dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Dalam sektor kesehatan, konsep transparansi tidak hanya berhenti pada penyediaan data anggaran secara umum, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih teknis dan spesifik. Misalnya, keterbukaan terkait harga satuan alat kesehatan, proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, hingga distribusi layanan kesehatan kepada masyarakat. Kompleksitas ini menjadikan transparansi di sektor kesehatan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sektor lainnya, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasinya.

Di sisi lain, korupsi sektoral dalam bidang kesehatan sering kali tidak muncul secara kasat mata, melainkan bersifat sistemik dan tersembunyi di dalam struktur birokrasi maupun hubungan dengan pihak swasta. Praktik korupsi dapat melibatkan berbagai aktor dalam rantai pengelolaan anggaran, sehingga sulit dideteksi apabila tidak terdapat sistem pengawasan yang kuat. Bentuk-bentuk korupsi yang umum terjadi antara lain penggelembungan harga (mark-up), konflik kepentingan dalam proses tender, serta manipulasi data layanan untuk kepentingan tertentu. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas dan pemerataan layanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan pendekatan preventif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui perancangan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.

2.2. Teori Good Governance dan Principal-Agent Problem

Dalam kerangka *good governance*, transparansi dipandang sebagai salah satu pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang akuntabel,

responsif, dan partisipatif. Transparansi menjadi prasyarat penting karena memungkinkan terbukanya akses informasi bagi publik terkait proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang aktif terhadap jalannya pemerintahan. Melalui akses informasi yang memadai, publik memiliki kemampuan untuk menilai, mengkritisi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan. Hal ini pada akhirnya dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena setiap tindakan pemerintah berada dalam pengawasan yang lebih luas (Bauhr & Grimes, 2021). Dengan kata lain, transparansi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, teori *principal-agent* memberikan penjelasan mengenai bagaimana korupsi dapat muncul akibat adanya ketimpangan informasi antara pihak yang memberikan mandat (principal) dan pihak yang menjalankan mandat tersebut (agent). Dalam konteks pemerintahan, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik. Namun, dalam praktiknya, pemerintah sering kali memiliki akses informasi yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat. Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku oportunistik, di mana pihak agent dapat bertindak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa diketahui oleh principal. Tanpa adanya transparansi, hubungan ini menjadi tidak seimbang dan rentan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, transparansi memiliki peran penting sebagai mekanisme korektif yang dapat mengurangi asimetri informasi dalam relasi principal-agent. Dengan membuka akses informasi secara luas, transparansi membantu memperkuat posisi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memastikan bahwa pemerintah menjalankan mandatnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan publik.

2.3. Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Kajian

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara transparansi dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks peningkatan akuntabilitas publik. Penelitian yang dilakukan oleh Cucciniello et al. (2020) menunjukkan bahwa transparansi memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan akuntabilitas, di mana keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja

pemerintah. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa efektivitas transparansi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan informasi, tetapi sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas serta kualitas informasi yang disediakan. Informasi yang sulit diakses atau tidak disajikan secara jelas justru dapat mengurangi manfaat transparansi itu sendiri.

Sementara itu, Bauhr dan Grimes (2021) menyoroti aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu peran partisipasi publik dalam mendukung efektivitas transparansi. Mereka berpendapat bahwa transparansi yang tidak disertai dengan keterlibatan aktif masyarakat hanya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai “transparansi semu”, yaitu kondisi di mana informasi memang tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pengawasan. Dalam situasi seperti ini, transparansi kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan hanya menjadi formalitas administratif semata.

Meskipun kajian mengenai transparansi telah berkembang cukup luas, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang secara spesifik mengaitkan transparansi anggaran kesehatan dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dan partisipasi publik. Sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan belum menyentuh karakteristik unik sektor kesehatan yang memiliki kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, esai ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih integratif, yaitu dengan menggabungkan aspek transparansi, teknologi, dan partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan strategi dalam upaya meminimalisasi praktik korupsi di sektor kesehatan.

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1. Kerentanan Sistemik Korupsi dalam Anggaran Kesehatan

Sektor kesehatan memiliki sejumlah kerentanan struktural yang menjadikannya sebagai salah satu bidang yang rawan terhadap praktik korupsi. Kerentanan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik sistem kesehatan itu sendiri yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Proses pengadaan barang dan jasa, misalnya, sering kali melibatkan berbagai tahapan administratif serta aktor yang beragam, mulai dari pemerintah, penyedia layanan, hingga pihak swasta. Ditambah lagi dengan tingginya nilai kontrak dalam pengadaan alat kesehatan maupun layanan medis, kondisi ini menciptakan peluang yang cukup besar bagi terjadinya penyimpangan. Situasi menjadi semakin rentan

ketika dihadapkan pada kondisi darurat, seperti wabah penyakit atau krisis kesehatan, di mana proses pengambilan keputusan sering kali dipercepat. Dalam keadaan seperti ini, prosedur yang seharusnya dijalankan secara ketat berpotensi dilonggarkan, sehingga membuka celah bagi praktik korupsi.

Selain faktor struktural tersebut, aspek transparansi informasi juga menjadi persoalan penting. Informasi terkait anggaran kesehatan pada umumnya bersifat teknis dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat luas. Data yang tersedia sering kali disajikan dalam format yang kompleks, sehingga sulit diakses dan dianalisis oleh publik. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *opaque system*, yaitu sistem yang tidak sepenuhnya terbuka dan sulit diawasi secara efektif. Dalam situasi seperti ini, praktik korupsi dapat berlangsung tanpa terdeteksi karena minimnya kontrol dari luar. Lebih jauh lagi, korupsi dalam sektor kesehatan tidak hanya terjadi sebagai tindakan individual, tetapi juga dapat berkembang menjadi praktik yang terinstitusionalisasi dalam sistem yang kurang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga erat kaitannya dengan kelemahan dalam desain dan implementasi sistem tata kelola itu sendiri.

3.2. Transparansi sebagai Instrumen Anti-Korupsi yang Transformatif

Transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai prinsip administratif dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga memiliki potensi transformatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam konteks sektor kesehatan yang kompleks, transparansi mampu mengubah cara kerja sistem dari yang sebelumnya tertutup menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Potensi transformatif ini setidaknya dapat dipahami melalui tiga mekanisme utama yang saling berkaitan.

Pertama, **reduksi asimetri informasi**. Salah satu akar utama korupsi adalah ketimpangan akses informasi antara pihak pengelola anggaran dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Melalui keterbukaan data anggaran, informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas menjadi lebih terbuka untuk publik. Masyarakat, lembaga pengawas, hingga organisasi masyarakat sipil dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alokasi, penggunaan, serta realisasi anggaran kesehatan. Dengan berkurangnya kesenjangan informasi ini, ruang untuk melakukan manipulasi data, mark-up anggaran, maupun penyimpangan lainnya menjadi semakin sempit.

Kedua, **penguatan akuntabilitas horizontal dan vertikal**. Transparansi memungkinkan terciptanya sistem pengawasan yang tidak hanya bertumpu pada lembaga formal seperti auditor atau aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-pemerintah. Masyarakat sipil, media massa, dan kalangan akademisi dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kebijakan publik. Dalam hal ini, akuntabilitas vertikal tercermin melalui hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, sementara akuntabilitas horizontal terlihat dari mekanisme kontrol antar lembaga dalam sistem pemerintahan. Kombinasi keduanya menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan berlapis.

Ketiga, **deterrence effect atau efek jera preventif**. Ketika informasi anggaran dibuka secara luas, aktor-aktor dalam birokrasi akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kesadaran bahwa setiap tindakan dapat diawasi dan berpotensi terungkap ke publik menciptakan tekanan psikologis yang mendorong perilaku lebih patuh terhadap aturan. Dengan kata lain, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang mampu menekan niat untuk melakukan korupsi sejak awal.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa transparansi tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang bersih. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi. Informasi yang dibuka harus disajikan dalam format yang mudah diakses, dipahami, dan dianalisis oleh publik. Tanpa adanya sistem yang mendukung pemanfaatan data secara aktif, transparansi berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, transparansi perlu diintegrasikan dengan upaya peningkatan literasi publik serta penguatan ekosistem pengawasan agar benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen anti-korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

3.3. Inovasi Kebijakan: Transparansi Berbasis Teknologi dan Partisipasi Publik

Sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas transparansi dalam mencegah dan memberantas korupsi, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya konvensional, tetapi juga inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks ini, esai ini menawarkan beberapa gagasan strategis yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dengan peningkatan partisipasi publik. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa transparansi yang efektif tidak cukup hanya dengan membuka akses informasi, tetapi

juga harus memastikan bahwa informasi tersebut dapat dimanfaatkan secara aktif oleh berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah **Open Health Budget System**, yaitu sebuah platform digital yang dirancang untuk menyajikan data anggaran kesehatan secara real-time, terintegrasi, dan mudah diakses oleh publik. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, hingga direalisasikan. Tidak hanya meningkatkan keterbukaan, sistem ini juga berpotensi menciptakan tekanan publik yang konstruktif terhadap pengelola anggaran agar bekerja secara lebih akuntabel.

Selain itu, diperlukan pula penguatan melalui **Citizen Audit Mechanism**, yaitu mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai aktor pengawas yang aktif. Melalui laporan berbasis komunitas, pengaduan digital, maupun forum partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan temuan atau indikasi penyimpangan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up.

Inovasi berikutnya adalah **Data Simplification Framework**, yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas data anggaran menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Data yang sebelumnya bersifat teknis dan sulit diakses dapat diolah menjadi visualisasi seperti grafik, infografis, atau dashboard interaktif. Langkah ini penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, sehingga transparansi benar-benar inklusif dan tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh kalangan tertentu.

Lebih lanjut, integrasi teknologi canggih seperti **Artificial Intelligence (AI)** juga dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan kemampuan analisis data dalam jumlah besar, AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola tidak wajar atau anomali dalam pengeluaran anggaran secara otomatis. Misalnya, sistem dapat mengidentifikasi lonjakan harga yang tidak rasional, duplikasi transaksi, atau penyimpangan lainnya yang berpotensi mengindikasikan praktik korupsi. Pendekatan ini memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

Secara keseluruhan, pendekatan inovatif ini menegaskan bahwa transparansi tidak boleh berhenti pada tahap penyediaan informasi semata. Transparansi harus bergerak dari yang bersifat pasif, di mana data hanya tersedia, menuju transparansi yang aktif, di mana data benar-benar digunakan sebagai alat kontrol, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan teknologi dan partisipasi publik, transparansi anggaran kesehatan dapat berkembang menjadi instrumen yang lebih kuat dan efektif dalam menciptakan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3.4. Implikasi Kebijakan dan Transfrmasi Tata Kelola

Implementasi transparansi anggaran kesehatan secara optimal memiliki potensi besar untuk mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menekan praktik korupsi, tetapi juga berperan dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan. Ketika informasi anggaran tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terukur, rasional, dan berbasis data. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi anggaran, karena alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan meminimalisasi pemborosan.

Di sisi lain, transparansi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, seperti pengadaan obat, fasilitas medis, maupun program kesehatan masyarakat. Kondisi ini mendorong penyedia layanan untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab, karena kinerjanya berada dalam pengawasan publik. Selain itu, transparansi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki akses terhadap informasi, muncul rasa memiliki terhadap kebijakan publik, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintah.

Dalam jangka panjang, penerapan transparansi yang konsisten dapat membentuk budaya birokrasi yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas. Transparansi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi menjadi bagian dari nilai dan praktik kerja sehari-hari dalam institusi pemerintahan. Perubahan budaya ini sangat

penting, karena pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum atau represif, tetapi juga memerlukan transformasi nilai dalam sistem birokrasi itu sendiri.

Lebih jauh lagi, transparansi yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dan partisipasi publik dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif. Sistem yang transparan memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih adil, akses layanan yang lebih merata, serta pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transparansi anggaran kesehatan tidak hanya berimplikasi pada aspek tata kelola, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

4. KESIMPULAN

Transparansi anggaran kesehatan merupakan instrumen strategis yang memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor yang memiliki kompleksitas tinggi seperti kesehatan. Melalui mekanisme reduksi asimetri informasi, transparansi mampu membuka akses terhadap data yang sebelumnya bersifat eksklusif, sehingga mempersempit ruang bagi praktik manipulasi dan penyimpangan. Selain itu, transparansi juga berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas, baik secara vertikal antara pemerintah dan masyarakat, maupun secara horizontal antar lembaga dalam sistem pemerintahan. Tidak kalah penting, keterbukaan informasi turut mendorong peningkatan partisipasi publik, yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan kolektif dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menyentuh gejala permukaan, tetapi mampu mengintervensi akar permasalahan korupsi secara lebih sistemik dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas transparansi tidak dapat dilepaskan dari kualitas desain kebijakan serta konsistensi implementasinya di lapangan. Transparansi yang hanya bersifat formalitas, tanpa didukung oleh aksesibilitas data, kejelasan informasi, serta keterlibatan publik yang aktif, berpotensi kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat. Integrasi platform berbasis data, penyederhanaan informasi, serta penggunaan teknologi seperti kecerdasan

buatan menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa transparansi tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar digunakan sebagai alat pengendalian korupsi.

Ke depan, penguatan transparansi anggaran kesehatan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi kebijakan publik. Upaya ini tidak hanya relevan dalam konteks pencegahan korupsi, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap peningkatan efisiensi anggaran, kualitas layanan kesehatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, transparansi yang terintegrasi dengan sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi publik yang aktif akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauhr, M., & Grimes, M. (2021). Transparency to curb corruption? Concepts and evidence. *Public Administration Review*, 81(3), 1–12. <https://doi.org/10.1111/puar.13303>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2020). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 80(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.13106>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan tahunan KPK*. <https://www.kpk.go.id>
- Transparency International. (2021). *Corruption in the health sector*. <https://www.transparency.org>
- World Health Organization. (2020). *Global spending on health: A world in transition*. <https://www.who.int>